

DESAIN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN YANG MENGINTEGRASIKAN NILAI-NILAI PANCASILA UNTUK MEMBANTU GURU PKn MEMBELAJARKAN NILAI-NILAI

Umi Chotimah

Dosen Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan
FKIP Universitas Sriwijaya

Abstrak: Tujuan utama penelitian ini adalah menghasilkan desain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila (RPPMNP) untuk membantu guru PKn dalam membelajarkan nilai-nilai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode R & D. Responden pada saat studi pendahuluan adalah 20 orang guru PKn dari sepuluh SMPN di kota Palembang dan lima orang validator, serta dua orang guru PKn kelas VII SMPN yang menjadi guru model pada saat uji coba terbatas dan ujicoba lebih luas. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, observasi dan dokumentasi. Simpulannya bahwa desain RPPMNP adalah RPP yang semua komponennya diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila yaitu mulai dari penentuan indikator, tujuan pembelajaran, bahan ajar, model dan metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media dan sumber belajar, serta instrumen penilaian.

Kata Kunci: *RPPMNP, Integrasi, Nilai-Nilai*

PENDAHULUAN

Beberapa tahun lalu, tepatnya pada tahun 1998, bangsa Indonesia mengalami krisis multidimensional. Krisis tersebut telah berpengaruh terhadap usaha bangsa Indonesia dalam mewujudkan warganegara yang baik, karena telah merusak pola kehidupan masyarakat Indonesia lebih-lebih lagi didukung oleh dampak negatif dari globalisasi. Hal tersebut terbukti di antaranya akhir-akhir ini banyak keluhan masyarakat tentang penurunan tatasusila, etika, nilai-nilai dan kreativitas, serta budaya dan

karakter bangsa menjadi lemah. Misalnya sebagian dari siswa yang berkelakuan tidak sopan dan kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, etika dan budaya Indonesia. Masyarakat Indonesia khususnya generasi muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya Barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai model. Dari kenyataan demikian itu, maka sudah seharusnya negara melakukan langkah-langkah penyelesaiannya agar

tidak menjadi permasalahan yang lebih serius lagi. Salah satu langkah yang ditempuh oleh negara Indonesia adalah dengan menetapkan pendidikan karakter, dan ini juga sejalan dengan fungsi pendidikan nasional Indonesia sebagaimana yang disebutkan di dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003.

Untuk merealisasikan akan pentingnya pendidikan karakter, bermula tahun 2010 bangsa Indonesia melalui Menteri Pendidikan Nasional, menetapkan pendidikan karakter sebagai tema peringatan hari pendidikan nasional. Walaupun sebetulnya UU RI No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, sudah menetapkan pendidikan karakter jauh sebelum dasar nasional pembangunan karakter bangsa, yaitu wujudnya karakter bangsa yang hebat, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang bercirikan dengan karakter dan perilaku manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamik dan berorientasikan IPTEKS.

Salah satu matapelajaran yang secara khusus (selain mata pelajaran Pendidikan Agama) yang dapat membina watak, nilai dan sikap serta memikul misi menjadikan rakyat Indonesia menjadi warganegara yang baik adalah matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), karenanya sudah seharusnya pembelajaran PKn dirancang sedemikian rupa

sehingga dapat membina dan mengarahkan sikap serta perilaku siswa.

Kehadiran PKn dalam kurikulum di Indonesia dapat dikatakan masih muda bila dibanding dengan siswaan Civics di Amerika Serikat. PKn di Indonesia banyak dipengaruhi oleh perkembangan Ilmu Kewarganegaraan (*Civics*) dan Pendidikan Kewarganegaraan *Civic (s) Education* di luar negara, utamanya Amerika Serikat, tanpa mengabaikan *civic* di negara-negara lain (Rusia, Singapura, Thailand, Jepang, Malaysia (Abdul Azis Wahab dan Sapriya, 2008). Mengingat pentingnya PKn maka hampir semua peletak dasar pendidikan di seluruh dunia memasukkannya dalam kurikulum sekolah, bahkan berdasarkan hasil *International Conference of Jurists* di Bangkok tahun 1965, PKn (*civic education*) menjadi salah satu kriteria negara demokrasi.

Di Indonesia, PKn sebagai pelajaran penting di sekolah, mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Bermula kurikulum tahun 1957 namanya Tatanegara dengan tujuan adalah membentuk "*nation and character building*" di mana sekolah dianggap sebagai *sociopolitical institution*. Pada tahun 1962 berganti dengan nama *Civic* yang bahan ajarnya digali dari sejarah, geografi, ilmu ekonomi, ilmu politik, pidato-pidato kenegaraan Presiden, pengakuan hak dasari manusia dan pengetahuan tentang PBB, Sejarah, Ilmu Bumi Indonesia dan Civic. Selanjutnya pada tahun 1968, diganti

lagi dengan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) yang diperuntukkan bagi SD, SMP dan SMA. Khusus untuk SMP dan SMA bahan ajarnya memuat tentang Sejarah Indonesia, UUD 1945. Pada kurikulum 1994, PKN berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Tahun 2004 berganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Tahun 2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dengan nama yang sama yaitu PKn, dan saat ini adalah Kurikulum 2013 kembali menjadi PPKn. Walaupun sudah delapan kali mengalami pergantian, namun orientasi isinya masih berkenaan dengan nilai-nilai. Pada hakikatnya nilai-nilai adalah konsep standard/kriteria, prinsip, sikap, yang dijadikan dasar pertimbangan untuk bertindak atau bertingkah laku. Nilai adalah sesuatu realiti yang bersifat abstrak, sebab nilai hanya dapat dirasakan di dalam diri masing-masing orang sebagai daya pendorong atau prinsip yang dapat dijadikan pedoman untuk bertindak. Oleh kerana sifatnya yang abstrak, maka menurut Fraenkel (1977) kita hanya boleh melihat nilai melalui penunjuk-penunjuk yaitu tindakan, kata-kata. Fraenkel menjelaskan bahawa tindakan seseorang/kelompok adalah petunjuk bagi kita terhadap nilai-nilai yang dianuti oleh orang/kelompok tersebut. Disamping tindakan, kata-kata juga menunjukkan nilai yang dianuti oleh orang/kelompok, contohnya dalam pidato, surat, kenyataan, editorial,

kartun, ertikel, perbualan, atau bentuk komunikasi bertulis/lisan.

Namun kenyataannya, banyak hal yang masih belum sesuai dengan harapan. Pertama, dari segi penetapan tujuan pembelajaran, guru PKn lebih cenderung menetapkan tujuan pada tingkatan kognitif (itupun pada tingkatan rendah) yaitu pada tingkatan menyebutkan, menjelaskan konsep dasar dan bersifat hafalan sahaja, padahal seharusnya orientasi utama PKn berorientasikan pendidikan nilai dan moral Pancasila (*value moral development*), pengembangan kemahiran penyelesaian masalah yang berkaitan pada peranan warganegara dalam proses kemahiran warganegara (*civic skills*), pembangunan wawasan warganegara (*civic knowledge*), pembangunan partisipasi warganegara (*civic participation*), pembangunan tanggung jawab warganegara (*civic responsibility*). Kedua, bahan ajar yang diajarkan oleh guru PKn, lebih menekankan pada penguasaan pengetahuan (kognitif) yaitu konsep-konsep, definisi dari pengetahuan pada tingkatan rendah. Siswa dituntut untuk menghafal bahan atau sejumlah konsep dan bersifat kognitif rendah. Ketiga, dari segi metode pembelajaran, kebanyakan guru PKn menggunakan metode pembelajaran ceramah, artinya guru menyampaikan informasi atau uraian tentang suatu pokok pembelajaran secara lisan, sedangkan siswa hanya mendengar, menerima apa-apa yang disampaikan oleh guru sehingga siswa tidak aktif, mencatat apa-apa yang disampaikan/yang ditulis oleh guru

tulis di papan tulis. Dalam hal ini guru lebih banyak mengajarkan pengetahuan (aspek kognitif), dibandingkan dengan melibatkan aspek afektif siswa. Dengan kata lain bahwa pembelajaran PKn lebih berpusat pada guru (*teacher centered*), sehingga siswa lebih banyak pasif dan bergantung penjelasan. Akibatnya siswa kurang perhatian, cepat bosan, mengantuk, tidak serius dan kurang berminat atau kurang bermotivasi dalam memsiswai PKn. Terlebih-lebih lagi, guru jarang menggunakan media pembelajaran, sehingga pembelajaran berlangsung membosankan akibatnya siswa kurang bermotivasi dalam belajar PKn. Maknanya juga bagaimana seorang guru mempunyai peranan yang besar bagi kejayaan siswa, sebagaimana disebutkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Republik Indonesia (dalam Ahmad Sudrajat, 2008) berdasarkan hasil penelitian di negara-negara yang sedang berkembang bahwa faktor yang menyumbang kepada hasil belajar siswa yang berasal dari faktor guru berjumlah 36%, selebihnya adalah faktor pembelajaran berjumlah 23%, 22% dari waktu, dan bermaksud faktor-faktor fisik sebanyak 19%.

Beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa walaupun berbagai metode telah diterapkan namun terdapat sebagian besar guru yang masih menggunakan metode ceramah tanpa memberi penerangan konsep yang mencukupi menyebabkan siswa yang tidak dapat menghayati nilai-nilai Pancasila sam ada

berkelakuan yang baik (Yunina 2009; Altapiko 2009; Ana Karolina 2009, Anugerah 2012), padahal di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses dinyatakan bahwa "proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada siswa untuk menggalakkan motivasi, minat, kreativiti, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar". Keempat, dari segi penilaian, guru PKn menilai capaian hasil belajar lebih mengutamakan penguasaan fakta dan hampir dapat dikatakan jarang guru menguji kemampuan berfikir siswa pada tingkat analisis, sintesis, penilaian, mahupun aplikasi, dan masa pembelajaran terbatas di kelas, terlebih lagi penilaian afektif, guru sangat jarang sekali melakukan penilaian afektif. Apabila dikaji alasan guru jarang melakukan penilaian afektif ternyata mereka belum tahu cara membuat instrumen penilaian afektif (Chotimah, 2011).

Masalah di atas didukung oleh beberapa hasil penelitian, diantaranya yang menyatakan bahwa pola mengajar yang dilakukan guru lebih bersifat pemberian pengetahuan tentang Pancasila dan lebih berorientasikan pencapaian hasil berupa angka daripada pembinaan moral, di samping suasana dan situasi pengajaran kurang mengarah pada pembentukan sikap siswa (Chotimah, 2011). Berkaitan dengan itu tujuan belum sepenuhnya tercapai. Tujuan pembelajaran belum dapat mencapai keputusan yang memuaskan, kerana hanya 2.85% jawapan siswa yang

mempunyai kecenderungan perilaku yang positif, yaitu kecenderungan untuk berkelakuan sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila. Sebanyak 1.78% pula mempunyai kecenderungan yang negatif, yaitu kecenderungan untuk berkelakuan menyimpang daripada tuntutan nilai-nilai moral Pancasila. Keputusan yang kurang memuaskan ini didukung oleh hasil penelitian menyatakan bahwa proses belajar mengajar belum mencapai tujuan PMP yang diharapkan. Guru-guru sepenilaian memberi pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila kepada siswa. Guru belum lagi membina dan memandu siswa untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak guru yang menekankan pengajaran kepada aspek pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila. Guru belum membina sikap dan tingkah laku siswa secara nyata sehingga siswa belum terbuka hati nuraninya untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila (Sunarno, 1992, Djuwita, 1993, dan Kadarusmadi, 1987).

Proses pembelajaran PKn yang dilakukan guru hanya untuk mencapai sasaran isi kurikulum dengan lebih banyak menekankan pada aspek pengulangan isi dengan cara mengingat atau menghafal beberapa fakta dan konsep serta memahami hubungan antara konsep secara terbatas, akibatnya terdapat salah tanggapan dari siswa yang menganggap PKn sebagai satu subjek yang dianggap mudah difahami. Padahal seharusnya pengajaran dan

pembelajaran PKn banyak melibatkan kemahiran proses PKn dan manipulatif memerlukan daya pemikiran dan kreativiti yang tinggi. Pembelajaran memerlukan kesefahaman konsep yang lebih tinggi, bagi mencapai afektif siswa.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran PKn yang dilakukan oleh guru-guru PKn SMP dalam kegiatan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) diketahui bahwa guru PKn baru sampai pada memberikan pengetahuan, atau belum lagi menyentuh nilai-nilai sehingga tujuan yang sebenarnya dari PKn, belum dapat dikatakan berpengaruh dalam mencapai tujuan (Chotimah, 2010). Jika ditelaah dari dokumen RPP yang di buat oleh guru, dan belum mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut nampak mulai dari penetapan tujuan pembelajaran, guru hanya menetapkan tujuan pada tingkatan kognitif saja (itupun hanya sampai pada tingkatan satu *knowledge*). Padahal seharusnya tujuan PKn, tidak hanya sepenilaian mencapai tujuan kognitif saja melainkan sampai ke tingkatan afektif (dan psikomotor). Ini terlihat dari tujuan PKn yang menyebutkan salah satu tujuannya adalah berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menangani isu kewarganegaraan, menyertai secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara bijak dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-rasuah dan lain-lain.

Agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan bagi pengembangan nilai dan watak, maka perlu dirancang pembelajaran yang dapat mendukung ketercapaiannya. Untuk itu pembelajarannya perlu dirancang dengan menggunakan berbagai strategi maupun metode pendidikan nilai (*value/character education*), baik sebagai kesan pembelajaran secara langsung (*instructional effects*) maupun sebagai kesan pengiring (*nurturant effects*), sehingga terwujudnya karakter bangsa yang hebat, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang bercirikan dengan karakter dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa; berbudi pekerti luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamik dan berorientasikan IPTEKS.

Dari aspek penetapan bahan ajar pula, sebatas ini guru hanya mengajarkan domain kognitif, itu pun hanya pengetahuan berupa fakta-fakta sahaja, sedangkan seharusnya materi PKn, sampai pada tingkatan kemahiran dan proses bahkan nilai-nilai. Dari segi penggunaan metode pembelajaran, sebagian besar guru hanya menggunakan metode ceramah yang diselingi dengan tanya jawab (Chotimah, 2011). Walaupun di dalam RPP disebutkan bahwa metode yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi dan metode penugasan. Padahal tuntutan kurikulum PKn, menghendaki agar guru menggunakan metode-metode pengajaran yang mampu mengajak

siswa untuk berfikir kritis dan merujuk pada pengajaran nilai-nilai, contohnya pengelasan nilai, analisis nilai, dan lain-lain. Dari segi instrumen penilaian, guru PKn lebih sering dan condong menggunakan penilaian bentuk tes dan terbatas mengukur kemampuan kognitif pada tingkatan satu dan dua, dan sangat jarang menggunakan penilaian afektif dan menggunakan non tes (Chotimah, 2010).

Kelemahan yang terjadi pada kurikulum 2006, juga disebutkan oleh Dasim Budimansyah Suryadi (2008; 2010) bahwa: PKn masih banyak menghadapi halangan dan batasan. Hambatan tersebut adalah: pertama, yaitu masukan instrumental (*instrumental input*) terutama yang berkaitan dengan kualitas pendidik dan keterbatasan kemudahan dan sumber belajar, kedua, masukan lingkungan (*environmental input*), terutama yang berkaitan dengan keadaan dan situasi kehidupan politik negara yang kurang demokratik (sebelum era reformasi) dan kehidupan masyarakat yang dihinggap *euphoria* kebebasan (selepas era reformasi). Disamping itu kesukaran dalam pembelajaran PKn (yang termasuk ke dalam pembelajaran nilai) adalah pertama, selama ini proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku cenderung diarahkan untuk pembentukan intelektual. Dengan demikian keberhasilan proses pendidikan dan proses pembelajaran di sekolah ditentukan oleh kriteria kemampuan intelektual.

Berdasarkan pada beberapa hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan-perbaikan terhadap pembelajaran PKn, yaitu perlu dikaji bagaimana usaha yang dapat dilakukan bagi membantu tercapainya tujuan PKn. Pembelajaran yang berkesan dan baik bergantung pada persiapan yang baik pula. Melaksanakan pembelajaran yang baik memerlukan rancangan pembelajaran yang baik pula, sebab rancangan pembelajaran merupakan pedoman bagi guru dalam mengajar. Agar pembelajaran dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai maka pembelajaran perlu dirancang dalam suatu rancangan pembelajaran. Proses tersebut bermula dari bagaimana guru menentukan, menerjemahkan kurikulum dan menguraikannya dalam *lesson plan* yang jelas dan tepat bagi pencapaian tujuan dari kurikulum. Rancangan tersebut dibuat untuk satu semester maupun untuk setiap pertemuan kelas. Rancangan yang dibuat untuk satu semester disebut dengan silabus, sedangkan untuk setiap pertemuan kelas atau disebut Rencana Pelaksanaan pembelajaran atau RPP (*lesson plan*). *Lesson plan* didefinisikan sebagai rancangan yang sistematis yang terdiri dari susunan, kondisi, bahan ajar, aktiviti serta evaluasi. *Lesson plan* juga diartikan sebagai rancangan terperinci dari pada pengajaran bagi suatu mata pelajaran (Price & Nelson, 2007; RC Mishra, 2007).

Dengan kata lain, salah satu upaya yang dapat dilakukan agar

tujuan kurikulum dapat tercapai adalah dengan mendesain pembelajaran dengan baik sesuai dengan tuntutan kurikulum, sebab pembelajaran yang efektif bergantung pada persiapan. Salah satu bentuk persiapan yang perlu dilakukan oleh guru adalah membuat perencanaan pembelajaran atau tepatnya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau *lesson plan*, sebab RPP merupakan acuan yang menjadi pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. *Lesson plan* yang baik apabila perancangannya didesain sedemikian rupa sehingga guru menjadi jelas melaksanakannya, sebagaimana dikemukakan oleh Harry Wong, 2009, bahwa "*the greater the structure of a lesson and the more precise the directions on what is to be accomplished, the higher the achievement rate*". Selanjutnya Vicky Duff, 2011, mengatakan bahwa *lesson plan* yang baik adalah *lesson plan* yang mengandung tujuan, *pre-assesmen*, daftar bahan ajar, pemanasan dan tambahan, presentasi, praktis, ujian, penutup dan aplikasi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan desain RPP matapelajaran PKn yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila untuk membantu guru PKn dalam membelajarkan nilai-nilai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian R&D dari Borg & Gall (2003), namun sudah dilakukan penyesuaian dari sepuluh tahapan menjadi

tiga tahapan, yaitu studi pendahuluan, pengembangan model, dan pengujian model. Penelitian ini melibatkan 20 orang guru PKn dan lima orang validator, dan dilakukan di tiga kelas VII yang berjumlah 113 orang siswa di tiga SMPN Palembang, yaitu SMPN A, SMPN B dan SMPN C Palembang. Nama SMPN A, B dan C tersebut adalah nama inisial (bukan nama sebenarnya dari SMPN tersebut), ini dilakukan untuk memenuhi etika dalam suatu penelitian. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik angket, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil Dan Pembahasan

Untuk menghasilkan desain RPP yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila (RPPMNP), peneliti melakukan beberapa langkah atau prosedur, yaitu *pertama*, peneliti melakukan analisis terbatas hasil studi pendahuluan yang sudah peneliti lakukan semasa tahun 2011. Studi pendahuluan ini peneliti lakukan adalah mengkaji literatur yang dapat mendukung desain RPP yang dihasilkan, metode pembelajaran nilai-nilai. *Kedua*, peneliti memberikan angket kepada 20 orang guru PKn yang mengajar di 10 (sepuluh) SMPN. Berdasarkan pada hasil angket dari guru PKn, selanjutnya peneliti membuat kesimpulan bahwa model RPPMNP perlu didesain berdasarkan saran daripada guru-guru PKn dan hasil kajian terhadap literatur.

Ketiga, berdasarkan pada prosedur penelitian serta mengkaji hasil penelitian literatur dan tahap pendahuluan terhadap keadaan dan situasi empiris pembelajaran PKn di beberapa SMPN yang berlaku, maka proses seterusnya yang peneliti lakukan adalah mendesain

model awal daripada RPPMNP dan berbincang dengan pakar pembelajaran bagi membelajarkan PKn yang mengintegrasikan nilai-nilai, maka ditetapkanlah untuk mendesain model desain awal RPPMNP, akan tetapi tetap tidak menyalahi peraturan yang berlaku ketika ini yaitu berdasarkan pada Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang standar proses. Model desain RPPMNP tersebut terdiri dari RPPMNP, skenario pembelajaran bahan pembelajaran, media pembelajaran, instrumen penilaian.

Keempat, RPPMNP yang telah didesain oleh peneliti dan divalidasi kepada lima orang validator. Mereka adalah terdiri dari dua orang ahli di bidang PKn, satu orang ahli di bidang PKn dan sekaligus ahli di bidang pendidikan nilai), satu orang ahli di bidang teknologi pendidikan (termasuk media pembelajaran), dan satu orang ahli silabus dan sekaligus ahli bahasa). Proses ini peneliti lakukan dengan cara menemui secara langsung kepada validator tersebut dan memberikan angket sebagai dasar bagi menilai dokumen RPPMNP. Setelah ditelaah lebih kurang dua bulan dan disahkan oleh validator, peneliti melakukan penelitian awal dan ulasan terhadap desain awal model RPPMNP. Hasil ulasan terhadap desain RPP desain tersebut menghasilkan model desain awal dari pada RPPMNP yang siap dirancang lebih lanjut dalam proses uji coba terbatas. Dari hasil ulasan tersebut bersama para pakar tersebut, menghasilkan model desain awal RPPMNP.

Kelima, peneliti melakukan komunikasi dengan guru PKn yang mengajar di kelas VII SMPN A Palembang sebagai sekolah tempat terbatas. Uji coba terbatas adalah uji coba yang dilakukan dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan draf

model desain awal RPPMNP yang sudah dilakukan perbaikan berdasarkan saran daripada validator. Tujuan penelitian pada tahap ini adalah bagi menemukan model desain RPPMNP yang dianggap efektif bagi membelajarkan nilai-nilai Pancasila. Setelah berdiskusi dengan guru PKn kelas VII SMPN A Palembang dipilihlah VII-1 sebagai kelas tempat uji coba terbatas.

Keenam, pelaksanaan uji coba terbatas dilakukan di kelas VII-1 yang SMPN A Palembang ini dilakukan selama enam kali pertemuan, akan tetapi sebelum pertemuan pertama dilakukan, peneliti memberikan pretes dan angket kepada pelajar. Ujian pra dilakukan selama 40 menit dengan bentuk soal MCQ. Pretes dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal mengenai materi yang berkenaan dengan norma, hukum, adat istiadat, kebiasaan dan proklamasi daripada para pelajar sebelum diajarkan oleh guru PKn dengan menggunakan model desain awal RPPMNP. Sedangkan angket diberikan untuk mengetahui bagaimana pendapat guru dalam menggunakan model desain awal dari RPPMNP. Dalam pertemuan tersebut, peneliti juga memberikan penjelasan dan latihan kepada guru PKn agar pelaksanaan pembelajaran PKn yang akan dilaksanakan pada pertemuan minggu berikutnya dapat berlangsung dengan baik. Pada pelaksanaan terhadap ujicoba terbatas dilakukan observasi oleh dua orang observer, mereka memberikan penilaian berdasarkan pada lembar observasi yang sudah disiapkan oleh peneliti.

Ketujuh, dilakukan ujicoba lebih luas di kelas VII-1 SMPN B oleh guru PKn yang berinisial YD. Ujicoba lebih luas juga dilakukan selama enam kali pertemuan., dan setiap kali pertemuan, guru diminta untuk memberikan validasi empirik, berdasarkan hasil analisis

terhadap validasi empirik dan hasil observasi dilakukan perbaikan-perbaikan. *Kedelapan*, pelaksanaan terhadap ujicoba lebih luas dari model RPPMNP di SMPN B Palembang dilaksanakan oleh guru PKn dengan inisial nama LD. Pelaksanaan pembelajaran dilangsungkan selama enam kali pertemuan. Setiap selesai mengajar guru diminta untuk mengisi angket sebagai uji validitas empiris kelayakan RPPMNP. Berdasarkan hasil validasi empirik daripada guru pada ujicoba terbatas terhadap model awal RPPMNP serta analisis terhadap hasil observasi dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa guru PKn setuju terhadap RPPMNP dan RPPMNP dapat digunakan untuk membelajarkan nilai-nilai. Berikut ini uraian tentang komponen RPPMNP yang sudah dihasilkan.

1. Identitas

Identitas meliputi judul, satuan pendidikan, nama sekolah, kelas, semester, matapelajaran, pertemuan ke, nama guru. Uraian masing-masing komponen tersebut, ialah sebagai berikut: Pertama, judul RPPMNP yang ditulis pada kedudukan sentral. Dilanjutkan dengan kedua, Satuan Pendidikan, yaitu yang menunjukkan tingkatan pendidikan, dalam penelitian ini ialah tingkatan SMP/MTs. Selanjutnya bagian ketiga ialah *Nama Sekolah*, pada bagian ini menunjukkan nama sekolah di mana guru yang bersangkutan mengajar, misalnya SMP Negeri A Palembang. Dilanjutkan dengan bagian keempat *Kelas/Semester*, yaitu menunjukkan pada tingkatan berapa RPP ini digunakan. Dalam penelitian ini khusus dibuat untuk tingkatan SMPN dan diguna untuk kelas VII (tujuh). Sedangkan semester *Semester ialah* menunjukkan pada semester berapa RPPMNP tersebut akan digunakan apakah genap/ganjil. Pada bagian kelima, yaitu

Matapelajaran dalam penelitian ini adalah Pendidikan Kewarganegaraan, dilanjutkan dengan bagian keenam, ialah *Pertemuan ke*, yaitu menunjukkan pertemuan ke berapa guru mengajar di kelas tersebut. Berikutnya ialah *Alokasi Waktu*, yaitu yang menunjukkan alokasi waktu yang disediakan untuk melaksanakan pembelajaran PKn, yang terakhir ialah *Nama Guru*, yaitu nama guru yang mengajar di kelas yang bersangkutan.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi atau SK yaitu kelayakan kemampuan minimum pelajar yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan kemahiran yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran. Dalam penelitian ini SK yang digunakan adalah SK 1, yaitu Menunjukkan sikap positif terbatasap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Kompetensi Dasar

Kompetensi Dasar atau KD adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai siswa dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Dalam penelitian ini terdapat 4 KD, yaitu 3 KD berasal dari SK 1 dan 1 KD berasal dari SK.2. KD yang berasal dari SK 1: Menunjukkan sikap positif terbatasap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terdiri dari KD 1.1 Mendeskripsikan hakekat norma-norma, kebiasaan, adat-istiadat, peraturan yang berlaku dalam masyarakat, KD 1.2 yaitu Menjelaskan hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara. KD 1.3 yaitu Menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan yang berlaku dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. Nilai-nilai Pancasila Yang Diintegrasikan

Nilai-nilai Pancasila yang diintegrasikan dalam penelitian ini adalah nilai-nilai yang bersumber daripada Pancasila, yaitu nilai-nilai dasar daripada masing-masing dasar dari pada Pancasila yaitu nilai dasar pertama: nilai-nilai keagamaan, dasar kedua: kemanusiaan, nilai dasar ketiga: persatuan, nilai dasar keempat: demokrasi/ nilai dasar kelima: keadilan, yang masing nilai dasar tersebut akan diintegrasikan mulai dari daripada penetapan indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, pemilihan bahan-bahan pembelajaran, model dan metode pembelajaran, langkah-langkah aktivitas pembelajaran, pemilihan media dan sumber pembelajaran sampai kepada penilaian yang relevan dengan SK dan KD kelas VII semester I.

5. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang boleh diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian KD tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang merangkumi pengetahuan, sikap, dan kemahiran. Dalam penelitian ini indikator pencapaian kompetensi, peneliti uraikan berdasarkan SK dan KD, yang di dalamnya mengandung kompetensi yang berdasarkan kepada taksonomi bloom (kognitif, afektif), akan tetapi mengingat nilai-nilai Pancasila yang akan diintegrasikan, maka yang lebih dominan adalah indikator pada domain afektif.

6. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran yaitu menunjukkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan indikator, KD dan SK yang bersangkutan. Tujuan pembelajaran yang dimuat di dalamnya lebih dominan kepada tujuan afektif.

7. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran adalah bahan ajar mengandung fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran menyangkut apa yang akan diajarkan atau apa yang akan dipelajari dalam rangka mencapai tujuan. Ia merupakan bahan ajaran yang dapat berupa subjek sama ada topik yang mengandung idea-idea pokok yang relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hakikatnya bahan mengandung ilmu pengetahuan, proses dan nilai-nilai. Dalam penelitian ini peneliti memilih bahan pembelajaran berdasarkan kepada tujuan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, KD dan SK, dan lebih memfokuskan kepada nilai-nilai Pancasila yang akan dicapai.

8. Model dan Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pelajar mencapai tujuan yang diharapkan. Di samping itu, pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan materi ajar, situasi dan keadaan pelajar, serta ciri-ciri dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan model pembelajaran *Values Clarification Techniques (VCT)*, dengan dengan

metode analisis nilai (*values analysis approach*) yaitu melalui analisis kasus yang memuat nilai-nilai, analisis gambar yang memuat nilai-nilai, yurisprudensi inkuiri, dan reportase/liputan. Alasan pemilihan model dan metode pembelajaran ini, dikarenakan relevan dengan penelitian penelitian ini adalah mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila.

9. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran adalah aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam pengarahan oleh guru dengan menggunakan model pembelajaran tertentu bagi mewujudkan suasana belajar agar pelajar mencapai tujuan pembelajaran. Dalam penelitian ini, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan model dan metode pembelajaran VCT dengan metode analisis nilai, yurisprudensi inkuiri dan reportase/liputan. Aktivitas pembelajaran dalam hal ini dibagi kepada tiga bagian, yaitu aktivitas pendahuluan, inti dan aktivitas akhir yang diperuntukkan bagi masa 2x40 menit untuk satu kali pertemuan. Dari masa 80 menit tersebut, masa yang paling lama adalah pada aktivitas inti, sedangkan pada kegiatan pendahuluan dan penutup lebih sedikit daripada masa pada aktivitas ini, yaitu untuk kegiatan pendahuluan antara 5-10 menit, sedangkan untuk kegiatan akhir selama 10-15 menit. Aktivitas pendahuluan yaitu aktivitas awal yang dilakukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian pelajar bagi berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dalam RPPMNP, aktivitas yang dilakukan guru adalah membimbing melakukan aktivitas berdoa, lalu memeriksa kehadiran pelajar, memeriksa kebersihan kelas, melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran. Aktivitas inti yaitu proses

pembelajaran bagi mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan secara interaktif, inspirasi, menyenangkan, memotivasi pelajar untuk menyertai aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi inisiatif, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi pelajar. Di dalam aktivitas inti dibagi menjadi tiga bagian yaitu, eksplorasi, elaborasi dan pengesahan. Eksplorasi adalah aktivitas pembelajaran yang digunakan bagi membina pengetahuan dasar pelajar. Elaborasi adalah aktivitas inti pembelajaran. Konfirmasi adalah tahap akhir dari pembelajaran, pada bagian ini guru memberikan *feedback* terbatas para pelajar. Aktivitas akhir yaitu aktivitas yang dilakukan bagi mengakhiri aktivitas pembelajaran, misalnya dilakukan dengan membuat rangkuman, penilaian dan refleksi, dan tindaklanjut.

10. Media dan Sumber Pembelajaran

Penentuan media dan sumber pembelajaran berdasarkan indikator dan tujuan pembelajaran, KD, SK serta bahan-bahan ajar, aktivitas pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Semuanya disesuaikan tujuan, KD/SK, materi dan pertemuan pada waktu itu. Untuk visual berupa media gambar dan film dokumenter yang diperoleh dari browsing di internet, audio yang relevan dengan materi ajar.

11. Penilaian

Penilaian dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan apakah sudah tercapai oleh siswa atau belum. Penilaian hal ini adalah penilaian hasil dan proses belajar. Komponen penilaian dalam RPP yaitu instrumen penilaian, kunci jawaban dan teknik penskoran. Dalam penelitian ini

peneliti menggunakan instrumen penilaian tes dan non tes. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif yaitu dengan bentuk pilihan berganda atau *MCQ (multiple choice question)*, sedangkan non tes yaitu dengan *skala likert* yang dilakukan untuk menilai kemampuan afektif. Untuk penilaian afektif digunakan skala Likert dan lembar observasi.

12. Tanda tangan Guru dan Kepala Sekolah

Tanda tangan Guru dan Kepala Sekolah adalah bagian akhir daripada RPP yaitu tanda tangan dari guru yang mengajar di kelas yang bersangkutan dan disahkan dan oleh kepala sekolah berikut cap sekolah.

PENUTUP

Desain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Yang Mengintegrasikan Nilai-Nilai Pancasila adalah RPP yang semua komponennya diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila yaitu mulai dari penentuan indikator, tujuan pembelajaran, bahan ajar, model dan metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media dan sumber belajar, serta instrumen penilaian. Sehingga dengan rancangan dan penerapan RPPMNP diharapkan tujuan akhir dari kurikulum PKn yang lebih menekankan pada pencapaian tujuan afektif dapat lebih mudah dicapai. Berdasarkan simpulan di atas, peneliti menyarankan kepada semua guru PKn untuk merancang dan menerapkan RPP yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila tentu saja disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran

yang SK dan KD sebagaimana tercantum di dalam kurikulum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Wahab dan Sapriya. 2008. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: UPI Press Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia
- Akhmad Sudrajat. 2008. *Pemberdayaan Guru*. (Online). <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/>.
- Altapiko. 2009. Pengaruh Penerapan Falsafah *Quantum Learning* Terhadap Interaksi Siswa Dalam Mencapai Tujuan Pembelajaran PKn di SMK Negeri 3 Palembang. Skripsi. Tidak diterbitkan
- Anugerah Agung Haryanto. 2012. Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Co-Op Co-Op Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Kelas VII SMP Negeri 10 Palembang. Skripsi. Tidak diterbitkan
- Borg & Gall. 2003. *Educational Research : An Introduction. Seventh Edition*. United States of America: Allyn and Bacon, Permission Departement.
- Dasim Budimansyah Suryadi. 2007. *Warganegara Multidimensional Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, dalam PKn Progresif: Jurnal Pemikiran dan Penelitian PKn*, Vol. 2 No.2, Desember 2007, 157-177
- 2008. *Revitalisasi Pembelajaran PKn melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan (Project Citizen)*, dalam Acta Civicus, Vol.1 No. 2, April 2008
- 2010. *Pembelajaran Pendidikan Kesadaran Kewarganegaraan Multidimensional*. Bandung: Genesindo.
- Fraenkel, Jack R. 1977. *How To Teach About Values. (An Analytic Approach)*. New Jersey: Prentice Hall Inc. Englewood Clifs.
- Harry Wong. 2009. <http://www.slideshare.net/jaysoncbucable/effective-lessonplanning>.
- Kadarusmadi. 1987. Pendidikan Moral Pancasila Dan Kecenderungan Perilaku Anak Didik : Suatu Studi Terbatasap Siswa SMA Negeri Di Kotamadya Banda Aceh. Tesis. Tidak diterbitkan
- Karolina. 2009. Perbandingan Hasil Belajar Sisa Antara Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Round Table dengan Metode Ceramah pada Matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Indralaya. Skripsi. Tidak diterbitkan
- Mishra, RC. 2007. *Lesson Planning*. New Delhi: Balaji Offset.
- Mohammad Zaaba Hj. Ismail & Zurida Hj. Ismail (2003). Budaya ICT di kalangan Guru-guru Sains dan Matematik di Daerah Pasir Putih. ICT Dalam Pendidikan dan Latihan: Trend dan Isu. Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standard Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

- Price, Kay.M & Nelson, Karna. 2007. *Planning Efective Instruction. 4th Edition. (Diversity Responsive Methods and Management.* USA: Linda Scheiber Ganster.
- Puspa Djuwita. 1993. Penampilan Guru PMP dalam Proses Belajar Mengajar dalam Membina Nilai-nilai Moral Pancasila di SMA Negeri Kotamadya Bengkulu (Studi Kualitatif Pembinaan Moral Pancasila. Tesis Magister PPS IKIP Bandung: Tidak diterbitkan.
- R.K. Patro and B.C. Mishra. 2003. *Values Profiles of School Students.* New Delhi: Discovery Publishing House
- Sunarno. 1992. Keragaman Proses Belajar Mengajar di Sekolah Dasar (Studi Deskriptif Analitis Terbatasap Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar PMP pada 3 Sekolah Dasar di Kabupaten Klaten). Tesis Magister PPS IKIP Bandung: Tidak diterbitkan.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Umi Chotimah. 2011. Alternatif Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan : Sebagai Upaya Mencapai *Civic Intelligence, Civic Participation dan Civic Responsibility (Proceeding Seminar Nasional Pendidikan, Tahun 2011, Di Palembang)*
- ,2011. Pengembangan Instrumen Penilaian Afektif Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP. (Laporan Penelitian, Tahun 2011)
- Vicky Duff, 2012. Mentor Training Coordinator, Department of Education, 609-292-0189 www.state.nj.us/...teacher_resources/effectivelesson_planning. Victoria. Duff @ doe.state.nj.us.13 Januari 2012.
- Yunina. 2009. Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Telaah Yurisprudensi Terhadap Keaktifan Belajar Siswa Pada Mata pelajaran PKn di SMPN 1 Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Skripsi. Tidak diterbitkan
- Zais, Robert S. (1976). *Curriculum (Principles and Foundations).* New York : Harper & Row Publishers.